| **No.** | **Ukuran Keberhasilan** | **Stake-**  **holders** | **B06** | **B12** | **B18** | **B24** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L | Kominfo | Konsultasi/penjaringan masukan publik terhadap konsepsi Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L | Konsultasi/penjaringan masukan publik terhadap konsepsi Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L | Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP | Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP |
| Tifa | Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L | Tersedianya rekomendasi pengaturan mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L | Terlibat dalam uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP | Tersedianya tanggapan/  masukan  atas  Peraturan Pemerintah yang  tersusun |
| 2. | Tersedianya peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Kominfo | Konsultasi/penjaringan masukan publik terhadap konsepsi peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Konsultasi/penjaringan masukan publik terhadap konsepsi peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Tersusunnya ancangan peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Tersedianya peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan |
| Tifa | Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Tersedianya rekomendasi untuk penyusunan peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Terlibat dalam uji publik rancangan peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan | Tersedianya tanggapan/masukan atas peraturan teknis mengenai pengendali data gabungan |
| 3. | Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri | Kominfo | Konsultasi/penjaringan masukan publik terhadap konsepsi Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri | Konsultasi/penjaringan masukan publik terhadap konsepsi Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri | Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai lembaga PDP | Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga  PDP |
| Tifa | Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri | Tersedianya rekomendasi pengaturan peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri | Terlibat dalam uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP | Tersedianya tanggapan/  masukan  atas  Peraturan Pemerintah yang  tersusun |
| 4. | Terlaksananya forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP | Kominfo |  | Adanya pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaa UU PDP | Adanya pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksanaa UU PDP | Adanya  pembahasan mengenai  persiapan implementasi  UU PDP |
| Tifa | Terlaksananya penjaringan masukan dari kelompok masyarakat sipil dan sektor privat mengenai proses dan substansi peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi | Terlaksananya forum diskusi pertama dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil | Terlaksananya forum diskusi kedua dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil | Terlaksananya forum diskusi ketiga dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil |